

Ruang Lingkup Perencanaan Sumber Daya Manusia

Devanto S. Pratomo, Ph.D



PENDAHULUAN

Sumber daya manusia diyakini sebagai salah satu penentu utama dari keberhasilan suatu bangsa atau negara. Perencanaan terhadap sumber daya manusia diperlukan untuk menjamin atau mengusahakan agar pemanfaatan setiap sumber daya manusia yang ada itu dapat berguna dan dimanfaatkan secara optimal. Dalam modul yang pertama ini, secara umum kita akan melihat bagaimana kondisi sumber daya manusia di Indonesia dewasa ini yang meliputi aspek ketenagakerjaan, kondisi pendidikan dan kesehatan, kependudukan dan masalah kemiskinan. Aspek-aspek tersebut juga merupakan fokus atau ruang lingkup pembahasan dari buku materi pokok ini. Selain itu, akan dibahas juga masalah-masalah yang dihadapi Indonesia sehubungan dengan kondisi sumber daya manusia yang dimilikinya, seperti misalnya persebaran penduduk yang tidak merata, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang menurun, dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan.

Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang:

1. kondisi sumber daya manusia Indonesia;
2. fokus atau ruang lingkup ekonomi perencanaan sumber daya manusia;
3. permasalahan atau isu-isu dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

KEGIATAN BELAJAR 1

Kondisi Sumber Daya Manusia Indonesia

A. GAMBARAN SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA

Indonesia adalah negara keempat terpadat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat dengan penduduk sebesar 237 juta jiwa. Penduduk Indonesia juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil Sensus Penduduk 1971 misalnya menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 119,2 juta jiwa dan sekarang telah menjadi 237,6 juta jiwa (menurut hasil Sensus Penduduk 2010). Meskipun jumlah penduduknya terus meningkat tetapi laju pertumbuhan penduduknya cenderung menurun. Hal ini terbukti dari turunnya laju pertumbuhan penduduk yang pada periode tahun 1971-1980 adalah sebesar 2,3%, kemudian pada periode tahun 2000-2010 turun menjadi sebesar 1,49%. Penurunan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia ini banyak didorong oleh turunnya tingkat kelahiran (fertilitas) di Indonesia melalui berbagai program antara lain melalui program Keluarga Berencana.

Penduduk atau sumber daya manusia diyakini sebagai salah satu penentu utama dari keberhasilan suatu bangsa atau negara, di samping tentunya kepemilikan sumber daya alam. Banyak contoh negara maju di Asia, seperti Jepang, Korea ataupun Singapura, mereka tidak memiliki sumber daya alam yang cukup besar dan potensial tetapi karena sumber daya manusia yang dimilikinya berkualitas maka kemajuan negara tersebut dapat kita saksikan bersama-sama dewasa ini. Di sisi lain, banyak negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam tetapi ternyata tidak didukung oleh sumber daya manusia yang handal sehingga pengelolaan sumber daya alamnya juga tidak dapat optimal.

Sumber daya manusia yang melimpah (dari segi kuantitas), juga belum tentu mendukung terhadap pembangunan suatu negara apabila tidak disertai dengan pengembangan dari segi kualitas. Apabila sumber daya manusia yang melimpah secara kuantitas tidak disertai dengan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas maka yang terjadi adalah sumber daya manusia tersebut justru akan menjadi beban pembangunan bagi negara. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kualitas sumber daya manusia

merupakan salah satu prasyarat utama bagi pembangunan. Menurut Notoatmodjo (2009), tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat dilihat paling tidak dari tiga faktor utama, yaitu dari latar belakang pendidikan yang dimiliki, kondisi kesehatan yang dimiliki, dan kemampuan ekonomi untuk menjaga kelangsungan hidup. Untuk mengembangkan kualitas pembangunan manusia inilah maka diperlukan sebuah perencanaan atau strategi terhadap pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Mangkunegara (2009), perencanaan terhadap sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan akan SDM yang diperlukan berintegrasi dengan perencanaan organisasi (perusahaan, negara atau daerah) agar tercipta jumlah dan penempatan SDM yang tepat guna dan bermanfaat secara ekonomis. Dari sisi makro, sumber daya manusia yang dimaksud adalah meliputi penduduk dengan segala karakteristiknya, tenaga kerja atau angkatan kerja secara keseluruhan. Sehingga tugas dari perencanaan SDM adalah menjamin atau mengusahakan agar pemanfaatan setiap sumber daya manusia yang ada itu dapat berguna dan dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan dari sisi mikro, perencanaan SDM adalah pengembangan atau manajemen sumber daya manusia atau karyawan pada level perusahaan. Dalam buku materi pokok ini akan dibahas perencanaan sumber daya manusia lebih kepada sisi makro, di mana perencanaan sumber daya manusia secara mikro akan banyak diulas pada topik manajemen sumber daya manusia. Beberapa permasalahan yang kerap kali timbul dalam pengembangan SDM secara makro dalam suatu negara akan dibahas dalam buku materi pokok ini seperti misalnya masalah pengangguran, kemiskinan, sektor informal, *human capital* dan masalah pengupahan. Analisis ini sangat diperlukan peranannya bagi kepentingan nasional karena sumber daya-sumber daya manusia yang berpotensi tinggi juga dapat dimanfaatkan oleh negara dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional.

B. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KETENAGAKERJAAN

Dalam melakukan pengembangan atau perencanaan sumber daya manusia tidak akan lepas dari kondisi perekonomian nasional. Kondisi perekonomian nasional dapat berhubungan secara langsung terhadap sumber daya manusia terutama terhadap penyerapan tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia saat ini mulai bangkit lagi pasca terjadinya krisis ekonomi yang hebat pada tahun 1997-1998. Produk Dometik Bruto (PDB) di

Indonesia tumbuh sekitar 5,4% rata-rata per tahunnya, menggambarkan kondisi makroekonomi yang relatif baik. Ini berbeda sekali dibandingkan misalnya ketika periode krisis ekonomi di mana tingkat pertumbuhan PDB menurun sampai sebesar 13% pada tahun 1998 dan turun sebesar 0,6% pada tahun 1999. Meskipun demikian, pertumbuhan PDB Indonesia saat ini tidak lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum krisis (1987-97) di mana rata-rata tingkat pertumbuhan PDB adalah lebih dari 6% per tahun (Tabel 1.1).

Tabel 1.1
Proporsi dan Pertumbuhan Ketenagakerjaan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia, 1987-2008

Pertumbuhan (% per tahun.)	1987-97	1997-02	2002-08	
▪ PDB	6.7	0	5.4	
▪ Pekerja	2.12	1.03	1.87	
▪ Angkatan Kerja	2.51	2.35	1.75	
Proporsi Ketenagakerjaan (%)	1987	1997	2002	2008
▪ Perkotaan	21.4	34.0	40.5	41.2
– Sektor Formal	11.8	19.4	23.4	22.8
– Sektor Informal	9.6	14.6	17.1	18.4
▪ Perdesaan	78.6	66.0	59.5	58.8
▪ Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Jumlah Pekerja (juta.)	70.4	87.0	91.6	102.6

Sumber: Sakernas dalam Manning dan Sumarto (2011)

Seiring dengan perkembangan PDB maka perkembangan penyerapan tenaga kerja juga kembali meningkat pasca krisis ekonomi. Pertumbuhan pekerja di Indonesia meningkat menjadi 1,87% per tahun pada periode tahun 2002-2008 dibandingkan hanya sebesar 1,03% pada periode 1997-2002. Meskipun demikian penyerapan tenaga kerja masih belum sebesar sebelum terjadinya krisis, yaitu sebesar 2,12% per tahun. Pekerja di daerah perdesaan masih memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan pekerja di daerah perkotaan namun dengan kecenderungan yang semakin menurun. Hal ini sejalan dengan transformasi struktural yang terjadi di Indonesia, yaitu peralihan dari perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian (sektor primer) ke arah perekonomian yang didominasi oleh sektor industri dan jasa. Selain itu, besarnya urbanisasi dari desa ke kota juga ikut memacu turunnya proporsi pekerja di daerah perdesaan. Sektor formal banyak dijumpai di

daerah perkotaan, sedangkan di daerah perdesaan, yang masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian tradisional, lebih banyak yang dapat kita kategorikan sebagai sektor informal.

Tingkat inflasi atau kenaikan harga juga relatif cukup baik, yaitu sebesar 3,35 % pada tahun 2015. Ini sangat berbeda dengan tingkat inflasi pada saat krisis yang mencapai 58% pada tahun 1998. Meskipun demikian, tingkat inflasi ini relatif berfluktuasi. Pemerintah memang terus berupaya mempertahankan tingkat inflasi melalui beberapa sasaran-sasaran inflasi yang disiapkan oleh Bank Indonesia. Namun, perlu disadari bahwa inflasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang terkadang berada di luar kendali pemerintah seperti ketidakpastian dari pasar finansial global, melambannya perekonomian global, dan fluktuasi harga komoditas. Dari dalam negeri yang biasanya dapat dipastikan akan ikut mempengaruhi tingkat inflasi misalnya adalah kenaikan harga beras atau bahan pokok pada menjelang hari raya dan kebijakan kenaikan harga BBM. Seperti yang terlihat dalam Tabel 1.2 kenaikan harga tertinggi dijumpai pada komoditi makanan dan transportasi, di mana tingkat inflasinya lebih dari 10%, pada tahun 2013 dan 2014.

Tabel 1.2
Tingkat Inflasi Tahunan per Komoditi

Komoditi	2011	2012	2013	2014	2015
Makanan	3,7	5,7	11,4	10,6	4,9
Makanan Olahan, Rokok	4,5	6,1	7,5	8,1	6,4
Perumahan, Air, Listrik, Gas	3,5	3,4	6,2	7,4	3,3
Pakaian	7,6	4,7	0,5	3,1	3,4
Kesehatan	4,3	2,9	3,7	5,7	5,3
Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	5,2	4,2	3,9	4,4	4
Transportasi, Komunikasi, dan Keuangan	1,9	2,2	15,4	12,1	-1,5

Sumber: BPS (2015)

Kinerja inflasi ini jelas dapat mempengaruhi ketenagakerjaan. Secara khusus, kinerja inflasi dapat mempengaruhi tingkat upah yang diterima pekerja, khususnya tingkat upah riil. Apabila terjadi kenaikan harga maka Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk komoditas barang-barang juga otomatis akan meningkat. Dengan IHK yang tinggi maka tingkat upah riil

akan menurun. Dengan kata lain, daya beli dari upah yang diterima pekerja juga otomatis akan menurun karena tingkat upah riil yang menurun. Selain itu, turunnya tingkat upah riil juga akan merembet pada hal-hal yang lain seperti tingkat kemiskinan. Dengan semakin tinggi harga-harga barang pokok, semakin rendah tingkat upah riil, maka semakin banyak pula penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin atau berada di bawah garis kemiskinan. Di samping itu, tingkat inflasi juga berpengaruh terhadap penentuan upah minimum di mana naiknya harga akan berpengaruh terhadap semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai komponen utama penentu tingkat upah minimum.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kondisi perekonomian pada pasca krisis ekonomi ini relatif membaik apabila dibandingkan dengan pada masa terjadinya krisis. Kondisi perekonomian yang membaik ini sebenarnya merupakan modal awal bagi penyediaan lapangan pekerjaan bagi sumber daya manusia atau angkatan kerja. Hanya saja masih terdapat beberapa masalah di mana fakta menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia ternyata masih belum dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi angkatan kerjanya. Dengan demikian, masalah pengangguran misalnya masih merupakan isu yang penting apabila kita membahas masalah ketenagakerjaan. Selain itu, pekerja juga masih terkonsentrasi pada pekerjaan di sektor pertanian tradisional maupun pada pekerjaan yang sifatnya informal. Pekerjaan-pekerjaan ini bukannya bersifat buruk, tetapi acap kali memberikan kompensasi atau upah yang relatif rendah karena nilai tambah yang rendah selain tentunya jaminan sosial yang terbatas. Pekerjaan di sektor formal juga belum mampu menampung seluruh angkatan kerja yang ada pada masa pasca krisis ekonomi ini. Dengan demikian, sektor informallah yang banyak bekerja sebagai katub pengaman bagi pasar tenaga kerja di Indonesia. Seperti yang kita lihat pada Tabel 1.3, perkembangan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor informal (khususnya nonpertanian) relatif lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Dengan indeks yang menggunakan tahun dasar 2001 maka penyerapan tenaga kerja di sektor informal sudah mencapai 138 pada tahun 2009, sedangkan sektor formal relatif lambat dengan hanya mencapai angka 107 pada tahun 2009.

Tabel 1.3
Tingkat Pengangguran, Indeks Penyerapan Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha dan Sektor, dan Indeks Upah, 2001 - 2009

Tingkat Pengangguran (%)		Indeks Penyerapan Tenaga Kerja (2001=100)				Indeks Upah ^{a)}
		Total	Pertanian	Nonpertanian		
				Formal	Informal	
2001	8.1	100	100	100	100	
2002	9.1	101	102	95	101	
2003	9.5	100	106	89	100	100
2004	9.9	100	102	92	109	101
2005	11.2	102	104	98	107	93
2006	10.3	102	101	97	114	95
2007	9.1	106	104	102	122	97
2008	8.4	109	104	100	132	95
2009	7.9	111	105	107	138	105
Total (juta)		105	42	29	34	

Sumber: Sakernas dalam Manning dan Sumarto (2011)

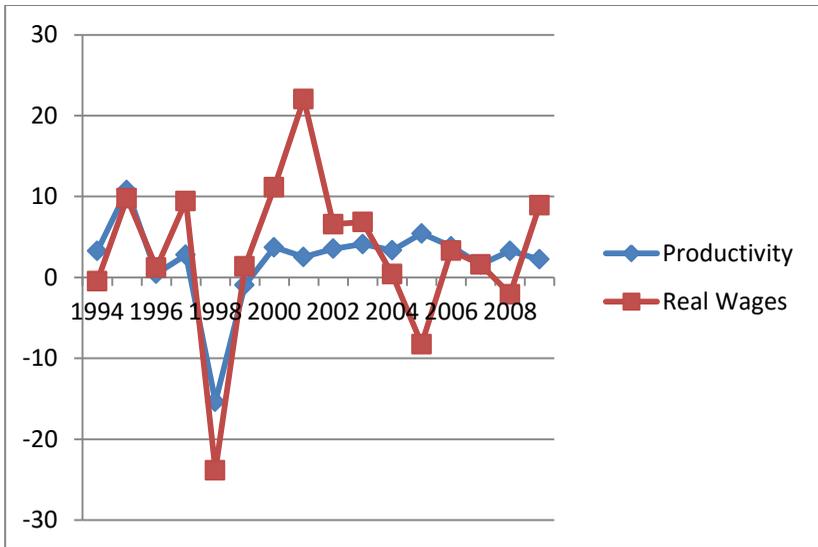
a Indeks upah riil dilihat hanya dari perkembangan upah pekerja laki-laki, dengan tahun dasar= 2003

Seperti yang telah disinggung di atas, apabila dilihat perkembangan ekonomi secara sektoral memang penyerapan tenaga kerja masih terkonsentrasi pada sektor pertanian. Namun, telah terjadi fenomena transformasi struktural di Indonesia, di mana perekonomian yang sebagian besar ditopang oleh pertanian (primer) mulai beralih ke sektor jasa (tersier). Memang sedikit berbeda dengan teori transformasi struktural secara umum yang biasanya menggambarkan peralihan perekonomian dari sektor yang terkonsentrasi pada sektor pertanian menjadi sektor industri. Sektor industri pengolahan (manufaktur) sendiri di Indonesia pasca krisis ekonomi relatif konstan. Justru yang berkembang adalah sektor jasa. Proporsi pekerja di sektor jasa meningkat secara signifikan dari sebesar 35% pada tahun 1993 menjadi sebesar 41% pada tahun 2010. Bandingkan dengan penurunan proporsi pekerja di sektor pertanian dari sebesar 50% pada tahun 1993 menjadi hanya sebesar 40% pada tahun 2010. Hanya sayangnya berbeda dengan negara maju, pekerja di sektor jasa masih banyak yang terserap pada pekerjaan-pekerjaan jasa dengan kualitas dan produktivitas yang rendah.

Tingkat pengangguran menunjukkan kecenderungan yang menurun sejak tahun 2005, seperti terlihat pada Tabel 1.3. Meskipun tingkat pengangguran menunjukkan tren yang menurun, tetapi perlu diperhatikan tentang keberadaan setengah penganggur atau pengangguran tidak kentara (dibahas di Modul 7). Pekerja dapat dikategorikan sebagai setengah penganggur apabila dia bekerja kurang dari 35 jam per minggunya. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010 setengah penganggur di Indonesia adalah 14,1%. Menggabungkan indikator pengangguran terbuka (pengangguran penuh) dan setengah pengangguran dapat menjadi indikator yang penting untuk melihat pemanfaatan tenaga kerja atau tingkat pengangguran yang sesungguhnya di Indonesia.

Indikator sumber daya manusia yang lain yang juga penting untuk menggambarkan kondisi ekonomi makro dan ketenagakerjaan di Indonesia adalah produktivitas kerja. Produktivitas kerja diukur sebagai rasio dari PDB riil terhadap jumlah pekerja atau *output* dibagi dengan *input* tenaga kerja. Indikator ini menunjukkan bagaimana kontribusi pekerja terhadap *output* atau produksi yang dihasilkan. Semakin tinggi tingkat produktivitas menunjukkan semakin baiknya kualitas pekerja dan sebaliknya semakin rendahnya tingkat produktivitas menggambarkan buruknya kualitas ketenagakerjaan.

Sama dengan indikator sebelumnya seperti PDB dan inflasi maka produktivitas pekerja cukup berfluktuasi meskipun secara umum dapat dikatakan relatif konstan atau stabil pasca krisis ekonomi. Pada masa krisis misalnya pertumbuhan produktivitas pekerja mengalami penurunan sampai sebesar 15,4% per tahun. Hal ini disebabkan karena perekonomian yang mengalami penurunan (dengan anjloknya PDB Indonesia) tetapi dengan jumlah pekerja yang terus meningkat. Meskipun demikian, sejak awal tahun 2000an produktivitas kerja sudah relatif stabil dengan peningkatan sekitar 2-3% per tahunnya. Apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga maka tingkat produktivitas pekerja di Indonesia meskipun demikian masih relatif rendah, di mana misalnya Singapura sudah mencapai 4,1%, China bahkan mencapai 11,1 % dan India sebesar 5,4% pertumbuhan per tahunnya.



Sumber: Sakernas

Gambar 1.1
 Pertumbuhan Produktivitas Pekerja dan Tingkat Upah Riil, 1994-2009

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan pertumbuhan produktivitas pekerja dan tingkat upah riil di Indonesia. Terlihat di situ bahwa ternyata perkembangan pertumbuhan produktivitas pekerja dan pertumbuhan tingkat upah riil cukup berbeda pergerakannya di mana tingkat upah riil cenderung sangat berfluktuasi sedangkan produktivitas cenderung konstan. Hal ini bisa menunjukkan kondisi pasar kerja yang masih kurang efisien, bahkan banyak kita dijumpai kondisi di mana tingkat upah riil berada di bawah produktivitas. Selain Gambar 1.1 juga menunjukkan bahwa masih belum terlihat kenaikan kualitas ketenagakerjaan yang signifikan di Indonesia di mana hal ini tercermin dari perkembangan produktivitas pekerja yang relatif konstan.

Apabila dilihat kondisi antarprovinsi maka produktivitas kerja tertinggi dijumpai di Provinsi DKI Jakarta, diikuti dengan provinsi yang kaya akan sumber daya alam seperti Kalimantan Timur, Riau, dan Kepulauan Riau. Provinsi-provinsi dengan dominasi dari sektor pertanian cenderung memiliki tingkat produktivitas kerja yang rendah. Beberapa provinsi seperti Bengkulu,

Gorontalo, Sulawesi Barat, NTB, dan NTT hanya memiliki tingkat produktivitas kerja satu per dua dari tingkat produktivitas nasional. Sepertinya diperlukan usaha untuk dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sehingga produktivitas kerjanya juga ikut bertambah (ILO, 2012).

C. KONDISI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Pendidikan diyakini sebagai salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan formal di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar (SD), pendidikan dasar menengah (SMP), dan pendidikan lanjutan (SMA). Pemerintah sudah melakukan cukup banyak usaha dalam peningkatan pendidikan di Indonesia. Ditandai dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan menjadi 20% dari anggaran negara. Jumlah ini setara dengan beberapa negara tetangga seperti Thailand, meskipun masih berada di bawah anggaran pendidikan Singapura ataupun Malaysia. Pemerintah juga telah memperbesar target pendidikan bagi penduduknya dari program wajib belajar 6 tahun menjadi program wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994. Dengan kata lain, saat ini sudah hampir seluruh penduduk Indonesia berusia sekolah memiliki pendidikan setidaknya sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kemajuan ini terlihat pada tahun 2005, di mana lebih dari dua pertiga anak seusia SMP dan 40% anak seusia SMA sedang berstatus bersekolah.

Indikator pendidikan yang lain seperti angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS) di Indonesia juga terus menunjukkan peningkatan. Apabila AMH Indonesia pada tahun 1996 menunjukkan angka 85,5% maka pada tahun 2013 AMH Indonesia adalah sebesar 94,1%. Demikian juga dengan RLS, meningkat dari rata-rata 6,3 tahun pada tahun 1996 menjadi rata-rata 7,9 tahun pada 2010 sejalan dengan adanya program wajib belajar 9 tahun. Kenaikan indikator-indikator pendidikan ini menjadi salah satu penyumbang penting dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia dari sebesar 67,7 pada tahun 1996 menjadi sebesar 73,30 pada tahun 2012.

Beberapa program yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalannya pendidikan misalnya adalah bantuan operasi sekolah (BOS) yang diperkenalkan sejak tahun 2005. BOS adalah program yang cukup komprehensif yang berbentuk *block grant* yang ditujukan secara spesifik pada peningkatan kualitas sekolah. Kebijakan ini sebenarnya timbul sebagai kompensasi dari kenaikan harga minyak pada saat itu. Meskipun demikian kebijakan ini masih perlu disempurnakan lebih lanjut karena acap kali mengalami kesulitan dalam memberikan prioritas kebijakan untuk pelajar miskin terutama di daerah terpencil sehingga pelajar yang sebenarnya terkategori miskin di daerah terpencil tidak banyak yang menerima langsung program ini, sebaliknya banyak pelajar yang sebenarnya terkategori tidak miskin, tetapi secara tidak langsung banyak yang menerima program ini. Belum lagi adanya masalah bahwa masih banyak anak-anak di luar sana yang tidak bersekolah dan tidak tersentuh oleh kebijakan pendidikan.

Dalam bidang kesehatan, Indonesia juga telah cukup banyak melakukan usaha yang signifikan. Jumlah fasilitas kesehatan yang bertambah, penyediaan infrastruktur termasuk infrastruktur kesehatan sampai ke tingkat perdesaan dan penemuan-penemuan vaksin baru memiliki andil yang cukup besar dalam perbaikan kualitas kesehatan. Beberapa indikator kesehatan penting yang menunjukkan perbaikan misalnya adalah kenaikan dari angka harapan hidup (AHH) yang meningkat dari 64,4 tahun pada tahun 1996 menjadi 69,4 tahun pada 2010. Indikator kesehatan yang lain, yaitu angka kematian bayi yang juga mengalami perbaikan yang signifikan, yaitu dari sebesar 145 bayi yang meninggal per 1000 bayi yang hidup pada tahun 1960-an menjadi hanya 41 bayi yang meninggal per 1000 bayi yang hidup pada tahun 2000-an.

Usaha peningkatan kesehatan bagi masyarakat miskin juga telah dilakukan. Pemberian bantuan kesehatan diberikan bagi masyarakat miskin di berbagai daerah untuk fasilitas gratis di klinik umum dan rumah sakit. Meskipun demikian klinik umum dan rumah sakit yang memberikan pelayanan untuk jenis ini masih relatif sedikit. Ditambah lagi beberapa kendala yang masih sering ditemui dalam penyediaan fasilitas kesehatan di Indonesia antara lain sulitnya akses atau infrastruktur di daerah-daerah terpencil, ketidakcukupan jumlah tenaga medis khususnya di daerah terpencil, dan mahalnya biaya langsung atau tidak langsung perawatan kesehatan. Investasi besar juga dilakukan untuk penyediaan sanitasi rumah

penduduk di perdesaan dengan kenyataan bahwa lebih dari 30% penduduk perdesaan belum memiliki akses sanitasi yang baik. Ketidakmampuan penyediaan sarana sanitasi ini mendorong penyakit perut yang berat seperti diare. Manning dan Sumarto (2011) menjelaskan bahwa program kesehatan yang berbasis masyarakat (melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan) sepertinya lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat *top-down* dari pemerintah, karena ini menyangkut juga perubahan budaya dari masyarakat kita.

D. KEMISKINAN

Masalah sosial penting yang menyangkut sumber daya manusia adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan ini banyak dijumpai di negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Indikator-indikator pengukur kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia relatif menurun meskipun masih belum sampai pada titik yang diharapkan. Kemiskinan yang menurun ini didukung oleh kondisi ekonomi nasional yang telah membaik pasca periode krisis. Hal ini bisa dilihat dari penurunannya tingkat kemiskinan dari sebesar 18,2% pada tahun 2002 menjadi 13,3% pada tahun 2010, dengan rata-rata penurunan 0,61% setiap tahunnya. Namun, apabila dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan per tahun sebelum periode krisis, maka kita dapat melihat bahwa ternyata penurunan angka kemiskinan pasca krisis relatif lebih lambat. Beberapa program atau strategi kebijakan pemerintah telah dilakukan dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan sebagai dampak dari krisis ekonomi seperti bantuan langsung tunai (BLT), inpres desa tertinggal (IDT), program padat karya (PPK), dan yang paling terakhir adalah program keluarga harapan (PKH).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan keterkaitan antara sumber daya manusia dengan perekonomian secara nasional.
- 2) Apakah yang dimaksud dengan produktivitas? Bagaimana kondisi produktivitas kerja Indonesia saat ini?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Jelaskan mulai dari pentingnya sumber daya manusia dalam perekonomian, kemudian tunjukkan kondisi keterkaitan PDB dan penyerapan tenaga kerja, dan produktivitas kerja.
- 2) Jelaskan definisi atau pengukuran dari produktivitas dan kondisi produktivitas dari data yang tersedia.

**RANGKUMAN**

Sumber daya manusia diyakini sebagai salah satu penentu utama dari keberhasilan suatu bangsa atau negara. Sumber daya manusia yang melimpah belum tentu mendukung terhadap pembangunan suatu negara apabila tidak disertai dengan pengembangan dari segi kualitas. Untuk itulah diperlukan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui perencanaan terhadap sumber daya manusia. Aspek utama dalam perencanaan sumber daya manusia adalah aspek ketenagakerjaan. Seiring dengan perkembangan PDB Indonesia maka perkembangan penyerapan tenaga kerja juga kembali meningkat pasca krisis ekonomi, meskipun tidak sebesar sebelum terjadinya krisis ekonomi.

Pendidikan diyakini sebagai salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator pendidikan seperti angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS) di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Dalam bidang kesehatan, Indonesia juga telah cukup banyak melakukan usaha yang signifikan. Termasuk di dalamnya adalah jumlah fasilitas kesehatan yang bertambah, penyediaan infrastruktur termasuk infrastruktur kesehatan sampai ke tingkat perdesaan dan penemuan-penemuan vaksin baru. Dibuktikan dengan semakin baiknya angka harapan hidup (AHH) dan rendahnya angka kematian bayi maupun Balita di Indonesia.

Masalah penting lain yang menyangkut sumber daya manusia adalah masalah kemiskinan. Indikator-indikator pengukur kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia relatif menurun meskipun masih belum sampai pada titik yang diharapkan. Beberapa program atau strategi kebijakan pemerintah telah dilakukan dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan sebagai dampak dari krisis ekonomi seperti bantuan langsung tunai (BLT), inpres desa tertinggal (IDT), program padat karya (PPK), dan program keluarga harapan (PKH).



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Indikator sumber daya manusia yang diukur sebagai rasio dari PDB riil terhadap jumlah pekerja disebut dengan....
 - A. efektivitas pekerja
 - B. produktivitas kerja
 - C. PDB per kapita
 - D. PDB per pekerja

- 2) Indikator di bawah ini merupakan indikator atau pengukur terhadap kondisi pendidikan, *kecuali*
 - A. angka melek huruf
 - B. rata-rata lama sekolah
 - C. Indeks pembangunan manusia
 - D. angka harapan hidup

- 3) Hal yang dianggap penting dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah, *kecuali*
 - A. latar belakang pendidikan
 - B. kualitas kesehatan yang dimiliki
 - C. kemampuan ekonomi
 - D. Kemampuan sosial

- 4) Pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggunya disebut dengan....
 - A. pengangguran terbuka
 - B. setengah penganggur
 - C. pekerja sampingan
 - D. pengangguran friksional

- 5) Indikator di bawah ini merupakan indikator atau pengukur terhadap kondisi kesehatan, *kecuali*
 - A. angka harapan hidup
 - B. angka kematian bayi
 - C. angka kematian balita
 - D. angka melek huruf

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Ruang Lingkup Ekonomi Perencanaan Sumber Daya Manusia

Ⓕ Fokus dari buku materi pokok ini adalah pada ekonomi perencanaan sumber daya manusia dari sisi makro. Ruang lingkup dari pembahasan dalam buku materi pokok ini mencakup tiga pokok materi utama, yaitu

1. perencanaan terhadap kependudukan yang mencakup pembahasan tentang proyeksi kependudukan, struktur dan persebaran penduduk dengan studi kasus di Indonesia;
2. perencanaan terhadap ketenagakerjaan, meliputi perencanaan penawaran dan kebutuhan tenaga kerja. Selain itu juga beberapa isu penting berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan yang masih banyak dijumpai seperti isu-isu tentang *human capital*, pengangguran, pengupahan dan informalitas;
3. masalah kemiskinan meliputi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kebijakan-kebijakan atau strategi baik jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan dalam usaha pengentasan kemiskinan.

Secara garis besar, apabila kita petakan secara spesifik maka terdapat beberapa isu-isu penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia yang memerlukan perencanaan atau strategi penyelesaian yang juga menjadi bahasan di buku materi pokok ini.

A. MASALAH KEPENDUDUKAN: *DEMOGRAPHIC DIVIDEND* DAN PERSEBARAN PENDUDUK

Seperti yang kita ketahui, jumlah penduduk Indonesia menunjukkan tren yang selalu meningkat. Sensus Penduduk 1971 misalnya menunjukkan bahwa penduduk Indonesia adalah 119,2 juta jiwa dan kemudian menjadi 237,6 juta jiwa menurut hasil sensus penduduk 2010. Meskipun mengalami kenaikan, tetapi dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif menurun yang didorong oleh penurunan tingkat kelahiran (fertilitas) di Indonesia. Apabila kita melihat struktur penduduk maka satu hal yang menggembirakan

adalah bahwa piramida penduduk Indonesia saat ini bersifat ekspansif dan cenderung berubah untuk bersifat konstruktif. Dengan demikian, penduduk Indonesia beberapa tahun ke depan (sekitar 2030) akan didominasi oleh penduduk usia kerja (15-64) atau penduduk usia produktif. Dengan kata lain, struktur penduduk Indonesia akan mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) atau periode di mana terjadi penurunan rasio beban tanggungan. Dengan menurunnya rasio beban tanggungan maka Indonesia akan banyak didukung oleh penduduk usia kerja dengan persentase yang relatif besar dibandingkan dengan penduduk yang harus ditanggung. Apabila kondisi ini dapat dimanfaatkan dengan baik maka tentunya ini adalah modal yang baik yang akan mendukung kondisi ketenagakerjaan dan secara tidak langsung terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Isu penting lain yang menyangkut masalah kependudukan adalah tentang persebaran penduduk di Indonesia di mana sejak lama kita ketahui bahwa Indonesia masih mengalami ketidakmerataan kependudukan yang tinggi. Pulau Jawa masih merupakan pulau yang terpadat penduduknya dibandingkan dengan pulau-pulau atau daerah-daerah lain di Indonesia. Pada Tabel 1.4 terlihat bahwa kepadatan penduduk di Pulau Jawa adalah sebesar 1033 jiwa/km², di mana kondisi ini sangat kontras dengan pulau-pulau besar yang lain di Indonesia. Memang hal ini dikarenakan Pulau Jawa adalah merupakan pusat perekonomian di Indonesia, selain sebagai pusat pemerintahan. Meskipun demikian, kecenderungan pertumbuhan kepadatan penduduk di Pulau Jawa relatif menurun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan kepadatan penduduk Pulau Jawa pada periode 1970-1980. Sebaliknya, pertumbuhan kepadatan penduduk di pulau-pulau lain di luar Jawa cenderung meningkat. Hal ini berarti telah terjadi perkembangan yang positif terhadap persebaran penduduk di Indonesia ke arah pemerataan penduduk dan ekonomi, meskipun hal ini tentu saja tidak memerlukan waktu yang sebentar. Masalah ini lebih rinci akan dibahas pada Modul 2.

Tabel 1.4
Kepadatan Penduduk Antar Pulau di Indonesia

No.	Daerah	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km^2)					
			1971	1980	1990	2000	2005	2010
1	Jawa	132.187	565	690	814	915	969	1033
2	Sumatra	473.606	38	59	77	86	87	107
3	Kalimantan	589.160	9	12	17	20	22	26
4	Sulawesi	189.216	37	55	66	76	83	92
5	Nusa Tenggara	88.488	87	96	115	122	133	148
6	Maluku	74.505	13	69	25	24	29	34
7	Papua	421.981	2	3	4	4	6	9
Indonesia		1.919.143	62	77	93	107	111	124

Sumber: Rusli (2012)

B. PERTUMBUHAN PENYERAPAN TENAGA KERJA YANG MENURUN

Dari sisi *supply*, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia relatif stabil dari waktu ke waktu (sekitar 66%-68%). Suatu hal yang menarik dilihat adalah TPAK perempuan (47%-51%) yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki (81%-84%). Memang di satu sisi kita ketahui bahwa perempuan biasanya harus membagi waktunya antara keputusan untuk bekerja dengan kegiatan-kegiatan domestik yang harus dilakukannya di rumah tangga. Secara sektoral, pekerja perempuan paling banyak ditemui pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sedangkan distribusi pekerja perempuan di sektor industri pengolahan (manufaktur) cenderung menurun dari periode krisis ekonomi sampai tahun 2004 dan kemudian menaik kembali setelahnya mengikuti kondisi perekonomian secara makro.

Dari sisi permintaan, penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan menurut jumlahnya, tetapi pertumbuhan penyerapannya justru mengalami penurunan. Hal ini sepertinya mengisyaratkan bahwa pemulihan ekonomi pasca krisis di Indonesia berjalan relatif lambat dan belum mampu mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang ada. Sektor yang bertanggung jawab terhadap kondisi penurunan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja ini adalah sektor jasa dan sektor industri pengolahan. Secara struktur, sektor pertanian masih mendominasi bagi penyerapan tenaga kerja

di Indonesia. Namun demikian, perlahan-lahan sektor jasa mulai menyaingi untuk mendominasi sebagai sektor utama dalam ketenagakerjaan Indonesia. Hanya saja sayangnya perkembangan sektor jasa di Indonesia ini lebih banyak didominasi oleh usaha jasa skala kecil dan sektor informal dengan kualitas ketenagakerjaan yang relatif rendah. Masalah kondisi penawaran dan penawaran ketenagakerjaan di Indonesia akan dibahas secara lebih rinci dalam Modul 3 dan Modul 4.

C. KETIDAKSESUAIAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN JENIS PEKERJAAN

Ketidaksesuaian pekerjaan (*mismatch*) merupakan permasalahan yang juga tidak mudah diselesaikan dalam dunia pasar kerja. Ketidaksesuaian pekerjaan menunjukkan bahwa pemberi kerja (perusahaan) tidak menemukan pekerja yang memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan sesuai yang dibutuhkannya. Di sisi lain, dengan latar belakang pendidikan tertentu pekerja juga tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian mereka. Pekerja sendiri cenderung menerima pekerjaan yang ada meskipun tidak sesuai dengan latar belakangnya karena kebutuhan mereka untuk menghidupi keluarganya. Di Indonesia, meskipun tren ketidaksesuaian pekerjaan cenderung menurun tetapi masih ada lebih dari 20% lulusan perguruan tinggi, baik tingkat sarjana maupun diploma yang bekerja tidak sesuai dengan bidang yang dipelajarinya. Dengan demikian, diperlukan strategi yang konkret yang dapat paling tidak menjembatani antara pencari kerja dan pemberi kerja sesuai dengan lapangan usaha yang dibutuhkannya. Masalah ketidaksesuaian pekerjaan ini akan dibahas lebih rinci pada Modul 5.

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA YANG MASIH RELATIF RENDAH DAN TIMPANG ANTAR DAERAH

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang menunjukkan pengembangan terutama dalam pembangunan sumber daya manusianya yang berfokus pada faktor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Secara umum, Indonesia digolongkan oleh UNDP sebagai negara dengan pembangunan manusia tingkat sedang (*medium human development*). Meskipun termasuk dalam kategori sedang tetapi hal ini relatif

rendah apabila dilihat secara peringkat dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang mempunyai peringkat IPM di atas negara kita. Selain itu, ketimpangan dari pembangunan manusia di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur masih relatif tinggi dan menjadi masalah yang pelik di negeri ini. Hal ini sejalan dengan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia bagian barat yang lebih cepat dan lebih tinggi dari Indonesia bagian timur. Masalah indeks pembangunan manusia akan dibahas secara lebih rinci pada Modul 5.

E. KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM YANG RENDAH

Kebijakan upah minimum adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam masalah pengupahan terhadap pekerja di Indonesia terutama di sektor formal. Secara spesifik kebijakan upah minimum adalah sebuah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menjaga agar pekerja khususnya pekerja sektor formal setidaknya mendapatkan upah yang layak dan memenuhi standar minimum pengupahan. Meskipun sudah cukup lama dicanangkan, tetapi tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap kebijakan upah minimum di Indonesia sendiri masih cenderung rendah. Di Indonesia, lebih dari 18% dari pekerja di daerah perkotaan pekerja formal masih dibayar di bawah tingkat upah minimum, sedangkan di daerah perdesaan lebih dari 29% dari pekerja adalah dibayar di bawah tingkat upah minimum. Alasan utamanya adalah kurangnya penegakan dan masih lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum itu sendiri. Penelitian Sugiyarto, dkk. (2010) bahkan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap upah minimum ini semakin lama semakin meningkat. Hal ini dikarenakan kecenderungan tingkat upah minimum sendiri yang selalu meningkat setiap tahunnya ternyata semakin membuat perusahaan kesulitan untuk membayar pekerjanya paling tidak setara dengan tingkat upah minimum yang ditetapkan. Masalah kebijakan upah minimum ini akan dibahas lebih rinci pada Modul 6.

F. KEMISKINAN PERDESAAN DAN KETIMPANGAN ANTARPROVINSI

Masalah yang terakhir yang diangkat dalam buku materi pokok ini adalah masalah kemiskinan. Salah satu ciri dari kemiskinan di Indonesia

adalah bahwa tingkat kemiskinan itu di daerah perdesaan jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan. Banyaknya penduduk miskin di daerah perdesaan ini salah satu penyebab utamanya adalah karena mayoritas penduduk daerah perdesaan yang bekerja di sektor pertanian tradisional dengan tingkat upah dan nilai tambah yang relatif rendah. Tabel 1.5 menggambarkan secara detail perbedaan indikator kemiskinan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan pada tahun 2009. Dari Tabel 1.5 terlihat bahwa kondisi di daerah perdesaan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kondisi di daerah perkotaan baik untuk indikator pendidikan maupun kesehatannya. Secara umum pada tahun 2009, 17,4% penduduk di daerah perdesaan masih berada dibawah garis kemiskinan, dibandingkan dengan 10,7% penduduk di daerah perkotaan.

Tabel 1.5
Perbandingan Beberapa Indikator Kemiskinan Desa-Kota, 2009

Indikator	Perdesaan (%)	Perkotaan (%)	Perbedaan (Gap)
Angka Kematian Balita per 1000 anak lahir	60,1	37,8	22,3
% Populasi yang tinggal di rumah tanpa dilengkapi toilet yang layak	50,4	15,1	35,4
% Populasi yang tinggal di rumah tangga di mana Kepala Rumah Tangganya tidak menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun	83,7	50,5	33,2
% Populasi yang tinggal di Rumah Tangga tanpa dilengkapi akses terhadap air bersih	56,5	30,6	26,0
% Populasi yang tinggal di Rumah Tangga di mana terdapat anggota rumah tangga usia 18-24 tahun yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun	40,7	16,0	24,7
% Populasi yang masih tinggal di rumah yang berlantaikan tanah	15,8	5,0	10,8
% Populasi yang berada di bawah garis kemiskinan	17,4	10,7	6,6

Sumber: Susenas dalam Suryahadi, dkk. (2011)

Ciri yang lain dari kemiskinan di Indonesia adalah bahwa kemiskinan antar provinsi di Indonesia sangat bervariasi dan menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Ada tiga faktor yang mempengaruhi ketimpangan kemiskinan di Indonesia, yaitu perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah, perbedaan SDM dan infrastruktur, dan terjadinya migrasi antar daerah di Indonesia.

Modul 9 akan secara rinci membahas tentang masalah kemiskinan dan penanggulangannya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Buatlah sebuah daftar tentang permasalahan-permasalahan yang masih banyak dijumpai dalam bidang sumber daya manusia di Indonesia, terutama yang menyangkut masalah kependudukan, ketenagakerjaan, dan kemiskinan. Diskusikanlah permasalahan mana yang menurut Anda patut menjadi prioritas dalam penanganannya dan jelaskan alasannya.

Petunjuk Jawaban Latihan

Anda dapat memulai dengan membuat poin-poin permasalahan dari penjelasan dalam kegiatan belajar di atas. Tambahkan apabila diperlukan.



RANGKUMAN

Ruang lingkup dari pembahasan dalam buku materi pokok ini mencakup tiga pokok materi utama, yaitu (1) perencanaan terhadap kependudukan yang mencakup pembahasan tentang proyeksi kependudukan, struktur dan persebaran penduduk dengan studi kasus di Indonesia; (2) perencanaan terhadap ketenagakerjaan, meliputi perencanaan penawaran dan kebutuhan tenaga kerja dan beberapa isu penting berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan; (3) masalah Kemiskinan meliputi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kebijakan-kebijakan atau strategi baik jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan dalam usaha pengentasan kemiskinan.

Secara garis besar, terdapat beberapa isu-isu penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia yang memerlukan perencanaan atau strategi penyelesaian, antara lain (1) masalah kependudukan: *Demographic Dividend* dan persebaran penduduk; (2) pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang menurun; (3) ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan; (4) indeks pembangunan manusia yang masih relatif rendah dan timpang

antar daerah; (5) kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum yang rendah; (6) kemiskinan perdesaan dan ketimpangan antar provinsi.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Terjadinya penurunan rasio beban tanggungan akibat perubahan struktur penduduk disebut dengan
 - A. struktur ekspansif
 - B. struktur restriktif
 - C. *demographic ratio*
 - D. *demographic dividend*

- 2) Berikut ini yang dimaksud dengan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan yang dilakukannya (*mismatch*) adalah
 - A. tempat pekerjaan yang terlalu jauh dari tempat tinggalnya
 - B. pekerjaan yang terlalu melelahkan dan menghabiskan waktu
 - C. pekerjaan yang dilakukan tidak sejalan dengan pendidikan yang sudah dia tempuh
 - D. pekerja dengan upah yang relatif rendah bagi lulusan sekolah dasar

- 3) Berikut ini, adalah beberapa kemungkinan alasan besarnya ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum di Indonesia, yaitu
 - A. kurangnya kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan
 - B. kecenderungan tingkat upah minimum yang cenderung selalu meningkat
 - C. tidak terdapatnya sanksi yang tegas terhadap pelaksanaan kebijakan
 - D. tingkat yang stabil setiap tahunnya

- 4) Penyebab tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan adalah
 - A. mayoritas bekerja pada sektor pertanian dengan upah dan nilai tambah yang rendah
 - B. banyak pengemis yang berasal dari daerah perdesaan

- C. pengangguran lebih tinggi di daerah perdesaan
 - D. produktivitas pekerja desa yang lebih tinggi
- 5) Berikut di bawah ini adalah komponen yang *tidak* termasuk fokus dalam pengukuran indeks pembangunan manusia, yaitu
- A. kesehatan
 - B. pendidikan
 - C. migrasi
 - D. pendapatan

Cocokkan jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) D
- 3) D
- 4) B
- 5) D

Tes Formatif 2

- 1) D
- 2) C
- 3) D
- 4) A
- 5) C

Daftar Pustaka

- A, Suryahadi; U. Raya; D. Marbun; dan A. Yumna. 2011. *Accelerating Poverty and Vulnerability Reduction: Trends, Opportunities and Constrains*, dalam *Employment, Living Standards and Poverty in Contemporary Indonesia*, ISEAS Singapore.
- ILO. 2012. *Labour and Social Trends in Indonesia 2011: Promoting job-rich growth in provinces*. Jakarta: ILO Office.
- Mangkunegara, A. 2009. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Manning, C dan S. Sumarto. 2011. *Employment, Living Standards and Poverty: Trends, Policies and Interactions*, dalam *Employment, Living Standards and Poverty in Contemporary Indonesia*, ISEAS Singapore.
- Notoatmodjo, S. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rusli, S. 2012. *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Edisi Revisi. LP3ES.